



**PEMERINTAH
KABUPATEN
KEBUMEN**

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU**



(0287) 385912, 385925



Jln.Indrakila No.10 Kebumen



dpmpstpkabkebumen@yahoo.com



www.dpmpstpkabkebumenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

LKjIP ini tidak hanya menyajikan capaian output kegiatan, tetapi juga menekankan pada pencapaian outcome serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan investasi daerah dan kualitas pelayanan perizinan.

Laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi, bahan pengambilan keputusan, serta dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing investasi di Kabupaten Kebumen.

Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga mendukung pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023, sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.

Kebumen, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen



Sukanto, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1

DAFTAR ISI.....2

DAFTAR TABEL.....3

DAFTAR GAMBAR.....4

DAFTAR GRAFIK.....5

BAB I PENDAHULUAN6

1.1. Gambaran Umum Organisasi.....7

1.1.1. Tugas.....7

1.1.2. Fungsi.....7

1.1.3. Struktur Organisasi8

1.1.4. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana 100

1.2. Fungsi Strategis 144

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi..... 177

1.4. Landasan Hukum..... 24

1.5. Sistematika Penulisan..... 246

1.6. Tindak Lanjut atas LHE AKIP Tahun Sebelumnya 257

BAB II PERENCANAAN KINERJA29

2.1. Perencanaan Strategis.....29

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra).....29

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 345

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis..... 367

2.2. Perjanjian Kinerja..... 378

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA40

3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 40

3.1.1. Analisis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 54

3.1.2. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya 61

3.2. Realisasi Anggaran 66

BAB IV PENUTUP74

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja..... 74

4.2. Permasalahan/Kendala. 75

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja. 76

LAMPIRAN79

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel I.2.	Sarana Prasarana Penunjang Kinerja	11
Tabel I.3.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	15
Tabel I.4.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	15
Tabel I.5.	Keselarasan RPJMD Kabupaten Kebumen Dengan RPJMN Nasional Tahun 2020-2024	15
Tabel I.6.	Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	16
Tabel I.7.	Identifikasi Permasalahan dan Tindak Lanjut Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen	18
Tabel I.8.	Perumusan Indikator Kinerja dan Crosscutting	22
Tabel I.9.	Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2024	26
Tabel I.10.	Tindak Lanjut SAKIP DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2024	27
Tabel II.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2025	31
Tabel II.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kab.Kebumen	36
Tabel II.3.	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	37
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	38
Tabel II.5.	Program dan Kegiatan Tahun 2025	38
Tabel III.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	40
Tabel III.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	43
Tabel III.3.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	43
Tabel III.4.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	44
Tabel III.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	45
Tabel III.6.	Capaian Kinerja dengan Kategorisasi Tahun 2025	47
Tabel III.7.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi	50
Tabel III.8.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel III.9.	Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2025	55
Tabel III.10.	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	58
Tabel III.11.	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	62
Tabel III.12.	Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Keadaan Saat ini	64
Tabel III.13.	Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2025	66
Tabel III.14.	Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2025	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Kebumen	9
Gambar I.2.	Pohon Masalah DPMPTSP Kabupaten Kebumen	21
Gambar III.1	Reviu Pimpinan atas Penyusunan LkjIP Tahun 2025	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1.	Jumlah Pegawai ASN dan Non-ASN	10
Grafik I.2.	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Grafik I.3.	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan	10
Grafik III.1.	Realisasi Investasi Tahun 2023-2025 Kabupaten Kebumen	46
Grafik III.2.	Realisasi Investasi Tahun 2021-2025 DPMPTSP Kab.Kebumen	48

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada tiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). LKjIP yang baik haruslah mencapai kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2025 yang merupakan kinerja tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. LKjIP Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

DPMPTSP Kabupaten Kebumen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Peraturan Bupati tersebut melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.1.1. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta pelayanan terpadu satu pintu.

1.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut DPMPTSP Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 6) Pelaksanaan administrasi; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPMPTSP diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Susunan organisasi tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, dan kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas: Koordinator Penanaman Modal dan Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Koordinator penanaman modal membawahi sub koordinator pengembangan penanaman modal, sub koordinator promosi penanaman modal, dan sub koordinator pengendalian penanaman modal. Koordinator pelayanan terpadu satu pintu membawahi sub koordinator pelayanan perizinan berusaha, sub koordinator pelayanan non perizinan, dan sub koordinator konsultasi, dan pengelolaan pengaduan. Seiring kebijakan penyederhanaan birokrasi, sub koordinator berfungsi sebagai Ketua Tim Kerja.

Adapun bagan struktur organisasi sebagaimana tertuang pada gambar I.1.

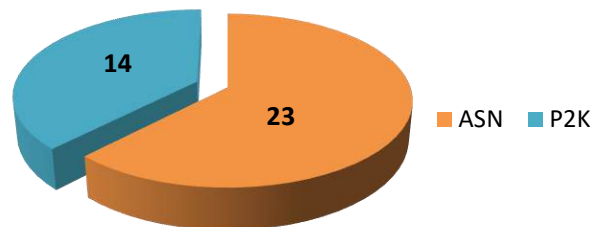
[illegible]

9

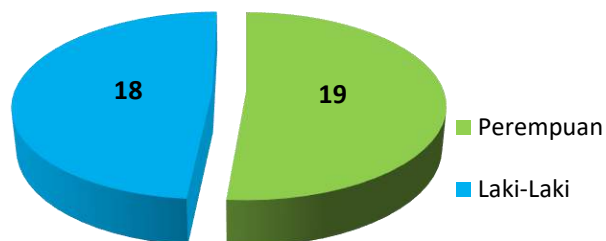
1.1.4. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumberdaya manusia DPMPTSP Kabupaten Kebumen yang dimiliki sejumlah 37 orang yang terdiri dari 23 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 14 P2K. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 19 perempuan dan 18 laki-laki. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan yaitu Gol. IV 2 orang, Gol III. 16 orang, Gol. II 1 orang, IX 2 orang, VII 1 orang dan V 2 orang, dengan rincian pada grafik sebagai berikut:

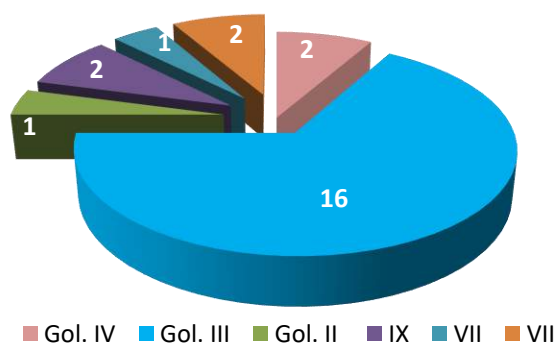
Grafik I.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non-ASN



Grafik I.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik I.3.
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan



Tabel I.1.
Kondisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	2	3	-	-	11
3	Pejabat Fungsional Penanaman Modal	-	4	-	-	-	-	4
4	Pejabat Fungsional Penata Perizinan	1	5	1	-	-	-	6
5	P2K	-	5	2	6	1	-	14
	JUMLAH	3	19	5	9	1	-	37

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok, dan fungsi, DPMPTSP Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya. Kondisi sarana dan prasarana yang ada sebagaimana terlihat pada Tabel I.2.

Tabel I.2.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			
				Baik	Sedang	Rusak Berat	Jumlah
Sarana							
1	Kendaraan Roda 4	5	Unit	5	0	0	5
2	Kendaraan Roda 2	10	Unit	8	0	2	10
3	Electric generating set	1	Unit	1	0	0	1
4	Scanner	4	Unit	4	0	0	4
5	Mesin Ketik Manual	2	Unit	2	0	0	2
6	Lemari Besi/Metal	2	Buah	2	0	0	2
7	Lemari Kayu	4	Buah	4	0	0	4
8	Rak Besi	5	Buah	5	0	0	5
9	Rak Kayu	1	Buah	1	0	0	1
10	Filing kabinet besi	6	Buah	6	0	0	6
11	Brandkas	1	Buah	1	0	0	1
12	CCTV	7	Unit	7	0	0	7
13	Mesin Absensi	1	Unit	1	0	0	1
14	Display	2	Unit	2	0	0	2
15	LCD	3	Unit	2	0	1	3
16	Focusing Screen/LCD	1	Buah	1	0	0	1
17	Papan Pengumuman	1	Buah	1	0	0	1

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			
				Baik	Sedang	Rusak Berat	Jumlah
18	Alat Kantor Lainnya	15	Buah	5	0	10	15
19	Meja Rapat	15	Buah	15	0	0	15
20	Meja ½ Biro	19	Buah	19	0	0	19
21	Kursi Rapat	136	Buah	136	0	0	136
22	Kursi tamu	4	Buah	4	0	0	4
23	Bangku Tunggu	13	Buah	13	0	0	13
24	Meja Komputer	5	Buah	5	0	0	5
25	Sofa	8	Buah	8	0	0	8
26	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	1	0	0	1
27	Lemari Es	1	Unit	1	0	0	1
28	AC Window	20	Unit	20	0	0	20
29	Kompor Gas	1	Buah	1	0	0	1
30	Kitchen Set	1	Buah	1	0	0	1
31	Televisi	2	Unit	2	0	0	2
32	Sound System	1	Unit	1	0	0	1
33	Camera	7	Unit	6	0	1	7
34	Tangga	1	Buah	1	0	0	1
35	Alat Rumah Tangga	7	Buah	7	0	0	7
36	Alat Pembantu Kebakaran	4	Buah	4	0	0	4
37	Meja Kerja Pejabat	16	Buah	16	0	0	16
38	Kursi Kerja Pejabat	18	Buah	18	0	0	18
39	Kursi Kerja Non Struktural	12	Buah	12	0	0	12
40	Lemari Buku	8	Buah	8	0	0	8
41	Microphone	2	Unit	2	0	0	2
42	Peralatan studio audio lainnya	1	Unit	1	0	0	1
43	Off Air TV Monitor	1	Unit	1	0	0	1
44	Tripod Camera	1	Buah	1	0	0	1
45	Stabilizer	1	Unit	1	0	0	1
46	Drawing Equipmemt	1	Unit	1	0	0	1
47	PC	10	Unit	10	0	0	10
48	Layar Proyektor	1	Unit	1	0	0	1
49	Laptop	19	Unit	19	0	0	19
50	Hard Disk	1	Unit	1	0	0	1
51	Monitor	2	Unit	0	0	2	2
52	Printer	14	Unit	11	0	3	14
53	AC	4	Unit	0	0	4	4
54	Tugu Peringatan Lainnya	4	Buah	4	0	0	4
55	Buku Umum	18	Buah	18	0	0	18
56	Mesin Hitung Elektronik	1	Buah	1	0	0	1
57	Alat Detektor Uang Palsu	1	Unit	1	0	0	1

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			
				Baik	Sedang	Rusak Berat	Jumlah
58	Papan Pengumuman	2	Buah	2	0	0	2
59	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	1	0	0	1
60	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	1	Buah	1	0	0	1
61	Dispenser	3	Unit	3	0	0	3
62	Alat Studio Video Lainnya	5	Unit	5	0	0	5
63	Peralatan Personal Computer	1	Unit	1	0	0	1
64	Extended Car PPPK	3	Buah	3	0	0	3
65	Neon Boks	4	Unit	0	0	0	0
66	Mesin Penghancur Kertas	3	Unit	0	0	0	0
67	Mesin Antrian	2	Unit	0	0	0	0
68	Peralatan Bermain Anak	4	Paket	0	0	0	0
69	Fire Alarm System	1	Unit	0	0	0	0
70	Roll Opec	2	Unit	0	0	0	0
Prasarana							
71	Gedung Kantor	2	Unit	1	1	0	
72	Instalasi Listrik	33.000	VA	33.000	0	0	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Secara umum sarana prasarana yang dimiliki dan alokasi anggaran mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Guna meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan terhadap publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, untuk itu adanya alokasi pengadaan barang yang dilakukan antara lain 8 unit Laptop, 1 unit Personal Computer Dekstop, 2 unit Printer Scanner, dan 1 unit Scanner Workstation. Perlunya pemeliharaan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) secara rutin dan penambahan anggaran guna pemeliharaan tersebut, guna memberikan layanan yang dapat memberikan kepuasan masyarakat. Hal ini juga sangat berhubungan erat dengan pandangan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan MPP merupakan satu sektor pusat layanan publik yang memiliki banyak unit layanan didalamnya.

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, dikarenakan DPMPTSP mengelola Mall Pelayanan Publik sebagai unit pelayanan publik agar tingkat kepuasan masyarakat makin meningkat dan bersinergi mewujudkan pelayanan prima, transparan, dan akuntabel.

1.2. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada visi daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”* maka DPMPTSP Kabupaten Kebumen berkontribusi pada misi ketiga yaitu; *“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”*.

DPMPTSP Kabupaten Kebumen mempedomani RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang telah diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Keselarasan akan visi dan misi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kebijakan Nasional tersebut dapat dilihat pada tabel I.3.

Tabel I.3
Keselarasan RPJMD Kab.Kebumen dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Visi	
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi	
Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

Tabel I.4
Keselarasan RPJMD Kab.Kebumen dengan
RPJM Nasional Tahun 2020-2024

RPJM Nasional Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Visi	
Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi	
Misi 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Tabel I.5
Keselarasan RPJMD Kab.Kebumen dengan
RJPD Kab.Kebumen Tahun 2005-2025

RJPD Kab.Kebumen Tahun 2005-2024	RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026
Misi	
Misi 4. Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan	Misi 3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi lima tahun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen. Visi Kabupaten Kebumen tersebut adalah Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat. Dari masalah utama yang dihadapi kemudian dibuat menjadi pokok-pokok visi.

Tabel I.6
Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

1	Visi	Mewujudkan Kabupaten kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
2	Misi Ketiga	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis, dan ekonomi kerakyatan
3	Tujuan 3.1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah
4	Sasaran 3.1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah
5	Strategi 3.1.2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
6	Arah Kebijakan	a. Percepatan perizinan berusaha dengan tersedianya unit kerja dan unit pelaksana teknis lainnya; b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terus ditingkatkan; c. Pengembangan inovasi kemasan promosi penanaman modal; d. Tersedianya data potensi investasi yang mudah diakses melalui media informasi, dan media sosial.

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Sedangkan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah.

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Isu dan permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan permasalahan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta dikaitkan dengan prioritas kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan tahun lalu, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu penting dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 yang memerlukan perhatian dan penanganan, disamping itu diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis Rencana Strategis tahun 2021-2026. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kebumen, antara lain:

- a. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik.
- b. Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan secara komprehensif.
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia Aparatur sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- d. Data profil peluang investasi belum *up to date*, dan masih dalam tahap identifikasi potensi wilayah.
- e. Belum optimalnya promosi penanaman modal sehingga minimnya minat investor.
- f. Perlunya optimalisasi sistem layanan perizinan berusaha dan non perizinan.

Berdasarkan permasalahan dan isu penting tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen, dilakukan tindak lanjut antara lain:

- a) Pengadaan sarana prasarana penunjang layanan secara berkala dan upaya dalam melakukan memperbaiki/pemeliharaan guna meningkatkan kualitas layanan perizinan;
- b) Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi

- standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK;
- c) Pelaksanaan promosi melalui media sosial, keikutsertaan dalam event daerah maupun nasional;
 - d) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan, atau gathering terhadap pelaku usaha. Menganalisa, inspeksi lapangan dan evaluasi pada pelaku usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e) Percepatan penanganan proses izin, dan penanganan pengaduan masyarakat;

Tabel I.7

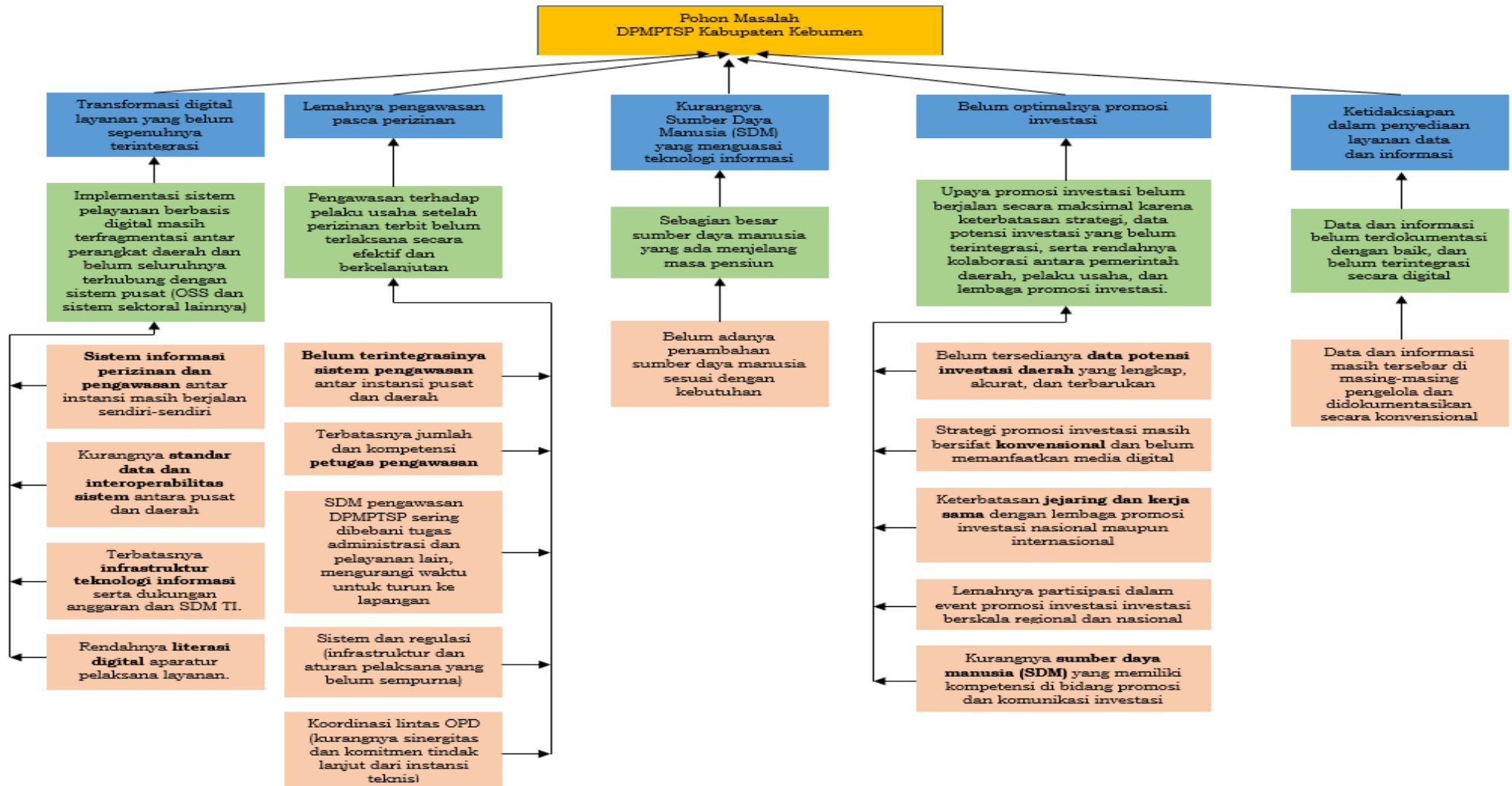
Identifikasi Permasalahan dan Tindak Lanjut Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP)	Pengadaan sarana prasarana penunjang layanan secara berkala dan upaya dalam melakukan memperbaiki/ pemeliharaan guna meningkatkan kualitas layanan perizinan.
2.	Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD teknis terkait.	Adanya pemeliharaan pada sistem perizinan (siperi) dan beberapa perubahan guna memudahkan proses perizinan.
3.	Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan secara komprehensif	Adanya penataan arsip dan monitoring arsip secara bertahap.
4	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban kerja (ABK)	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK
5	Data profil peluang investasi belum <i>up to date</i>	Upaya update data pada aplikasi Galaksi (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi)
6	Kurangnya kreatifitas dan inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi investasi	Pelaksanaan promosi melalui media sosial, keikutsertaan dalam event daerah maupun nasional.
7	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan guna kegiatan usahanya.	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan, atau gathering terhadap pelaku usaha
8	Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat	Koordinasi terkait pembahasan kebijakan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

9	Data dan informasi kegiatan usaha kurang sesuai antara OSS dengan kenyataannya.	Melakukan analisa, inspeksi lapangan dan evaluasi pada pelaku usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10	Kurangnya optimalisasi pada promosi penanaman modal sehingga minimnya minat investor	Penyelenggaraan seminar penanaman modal, forum bisnis, pameran penanaman modal, dan publikasi informasi potensi investasi baik melalui digital maupun media cetak.
11	Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan belum seluruhnya selaras, jumlah SDM tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dibutuhkan	Pemetaan Kebutuhan SDM, dilakukan bimbingan/pelatihan dan evaluasi pada pegawai.
12	Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal	Percepatan penanganan proses izin, dan penanganan pengaduan masyarakat
13	Perlunya optimalisasi sistem layanan perizinan berusaha dan nonperizinan baik sumber daya, dasar peraturan, dan perangkat pendukungnya.	Dilakukannya pemeliharaan sistem layanan perizinan secara bertahap berupa upgrade sistem operasi maupun perangkat keras guna meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.
14	Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat	Perlunya proses sinkronisasi peraturan pusat dengan peraturan daerah
15	Kurang optimal pemantauan pemenuhan komitmen dan notifikasi perizinan berusaha dan nonperizinan	Pelaksanaan rapat koordinasi terkait pemantauan komitmen perizinan dan nonperizinan
16	Masyarakat belum seluruhnya menggunakan website yang tersedia untuk memperoleh informasi pelayanan perizinan dengan aplikasi izin online	Dilakukannya penyebaran informasi penggunaan layanan baik secara online melalui media sosial maupun dengan kegiatan sosialisasi atau bersamaan dengan layanan jemput bola.

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Gambar I.2
Pohon Masalah DPMPTSP Kabupaten Kebumen



Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2025

Tabel I.8
Perumusan Indikator Kinerja dan Crosscutting

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja	Crosscutting Kinerja
Meningkatnya Peranan Investasi Terhadap Perekonomian Daerah	Meningkatnya nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Regulasi teknis yang mendukung percepatan pelayanan perizinan dan terciptanya iklim investasi	Tersusunnya kebijakan daerah terkait pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2. Bagian Hukum 3. Bagian Organisasi 4. Tim Teknis Perizinan 5. Pelaku Usaha 6. Akademisi
		Pemberian kemudahan dalam berusaha bagi para investor	Terlaksananya kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Peraturan daerah rencana umum penanaman modal	
	Menumbuhkan kepedulian investasi daerah kabupaten kota	Peningkatan promosi investasi melalui berbagai sarana guna menarik investor	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kepedulian investasi daerah	1. Kementerian Investasi/BKPM 2. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 3. Pelaku Usaha
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan jaringan kerja sama dengan lembaga, investor, akademisi, dan aparat pemerintah sehingga terjalin sinergi	Terlaksananya pelayanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik dan pengelolaan pengaduan	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara	1. Kementerian Investasi/BKPM 2. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 3. Tim Teknis Perizinan

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja	Crosscutting Kinerja
		guna mendapatkan data-data yang akurat		elektronik	4. Pelaku usaha 5. Bagian Organisasi 6. Akademisi
		Penerapan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi pelaporan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	7. Tenant Layanan di MPP Kebumen 8. Media Massa
	Meningkatnya kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	Terjalannya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan	Terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi dan pengawasan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	1. Kementerian Investasi/BKPM 2. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 3. Pelaku Usaha
		Meningkatnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Tersedianya data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikaji dan dimanfaatkan	Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	
	Terkelolanya data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi	Penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan	Pendataan teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	1. Kementerian Investasi/BKPM 2. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 3. Tim Teknis Perizinan

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja	Crosscutting Kinerja
	Meningkatnya pelayanan terhadap urusan pemerintahan daerah	Pemberdayaan aparatur pelayanan investasi dan perizinan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan investor.	Tersusunnya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	1. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2. Inspektorat 3. BPKPD 4. Bapperinda 5. Bagian Organisasi 6. Pihak Ketiga
			Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	
		Sarana yang memadai untuk mendukung tercapainya pelayanan yang prima	Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	1. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2. Inspektorat 3. BPKPD 4. Bapperinda 5. Bagian Organisasi 6. Pihak Ketiga
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penunjang urusan pemerintahan daerah	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian singkat tentang rencana strategis dan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.6. Tindak Lanjut atas LHE AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Kebumen adalah **76,65** dan termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel I.9.

Tabel I.9

Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	26,10	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	25,50	23,40
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	13,50	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	17,50	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		100 %	82,60	76,75
Tingkat Akuntabilitas			A	BB

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, 2025

Dalam rangka penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih efektif pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen, terdapat beberapa rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Kebumen dan tindak lanjut yang telah dilakukan DPMPTSP Kabupaten Kebumen sebagaimana terlihat pada Tabel I.10.

Tabel I.10
Tindak Lanjut Evaluasi AKIP DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi <i>crosscutting</i> kinerja dengan tupoksi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Melakukan analisa terkait program dan kegiatan adanya potensi <i>crosscutting</i> kinerja dari Perangkat Daerah lain dalam mencapai kinerja	Laporan analisis potensi <i>Crosscutting</i> program kegiatan
2.	Melaksanakan monitoring atas Rencana Aksi kinerja secara berkala yang pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan kegiatan Rakor Pop/K	Pencermatan dalam penyusunan laporan Rakor Pop/K terkait monitoring rencana aksi kinerja	Sebagai acuan dalam penyusunan laporan Rakor Pop Triwulan III Tahun 2024
3.	Penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja dalam rencana kerja dengan menyajikan penjabaran/analisis atas perbaikan kinerja sebelumnya serta menyajikan informasi perbaikan/penyempurnaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam RPJMD/Renstra seperti inovasi, proker atau peningkatan target kinerja	Pencermatan dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja terkait hal inovasi, penyelarasan dengan tema sesuai dengan RKPD, dan dampak positif bagi masyarakat	Penambahan bahasan terkait inovasi dan dampak positif pada dokumen perencanaan
4.	Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya peta prosesi bisnis pada tahun 2022 beserta dengan SOP Kegiatan dan SK peta proses bisnis yang berpedoman pada DPA tahun anggaran tersebut.	Telah tersusunnya SOP kegiatan yang terdapat pada SK Peta Proses Bisnis

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5.	Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi atas capaian kinerja secara detail dengan menjabarkan proses perolehannya serta konteks/dampaknya terhadap masyarakat atau best practice/prestasi atas capaian kinerja	Pencermatan pada penyusunan laporan tepatnya penambahan bahasan terkait dampak positif yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja	Sebagai acuan guna penyusunan laporan kinerja tahun mendatang
6.	Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia	Telah tersusunnya laporan kinerja dengan adanya analisis efisiensi dan analisis sumber daya anggaran sesuai dengan arahan Bagian Organisasi Setda Kebumen	Telah ada laporan analisis efisiensi dan sumber daya anggaran pada dokumen LKjIP
7.	Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024 pada BAB Pendahuluan	Sebagai bahan pedoman guna penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024	Pencermatan terkait bahasan hasil rekomendasi SAKIP tahun 2024

Sumber: Data Perencanaan DPMPTSP Kab.Kebumen, 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan jangka menengah suatu instansi pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, serta arah kebijakan untuk kurun waktu lima tahun. Berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan operasional guna mencapai sasaran jangka menengah sekaligus meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Visi : *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”*.

Misi ke-3 : *“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”*

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka yang jelas dan terarah, khususnya pada misi ketiga, yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar penetapan indikator kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Adapun rumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan:

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata melalui optimalisasi potensi unggulan daerah.

Sasaran:

Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan visi dan misi pemanfaatan daerah Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka DPMPTSP Kabupaten Kebumen sesuai dengan fungsi strategisnya menjabarkan misi yang ketiga yaitu “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”.

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka dibuat rumusan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Kebumen secara rinci sebagaimana Tabel II.1.

Tabel II.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tujuan:		Pertumbuhan ekonomi	Persen (%)	5,24
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah				
2.		Sasaran:	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	Milyar rupiah	409,00
		Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah.	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan berusaha	1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta pengawasan pengendalian penanaman modal 2) Terpenuhinya SPM Pelayanan Perizinan berusaha
Meningkatnya investasi	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan berusaha	1) Percepatan perizinan berusaha dengan tersedianya unit kerja dan unit pelaksana teknis lainnya 2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terus ditingkatkan. 3) Pengembangan inovasi kemasan promosi penanaman modal. 4) Tersedianya data potensi investasi yang mudah diakses melalui media informasi dan media social

Sumber: Renstra DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendorong transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan. Strategi penanaman modal kini bertransformasi dari sekadar pengejar kuantitas menjadi penggerak ekonomi berkualitas melalui penguatan hilirisasi industri dan pemerataan investasi antarwilayah. Fokus kebijakan diarahkan untuk membangun rantai pasok yang inklusif, di mana investor besar didorong untuk bersinergi dengan UMKM lokal. Hal ini bertujuan agar setiap modal yang masuk tidak hanya terkonsentrasi di satu titik, tetapi mampu menciptakan efek domino ekonomi yang lebih luas dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi operasional, urusan perbantuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperkuat melalui digitalisasi total dengan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) guna memangkas hambatan birokrasi. Arah kebijakan ini mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi waktu. PTSP tidak lagi hanya berperan pasif sebagai penyedia izin, melainkan bertindak proaktif dalam melakukan pendampingan dan penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.

Ke depan, kebijakan investasi akan semakin adaptif terhadap tren global dengan memberikan prioritas pada investasi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui deregulasi yang berkelanjutan serta penguatan integritas tata kelola, sistem penanaman modal dan pelayanan terpadu ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam meningkatkan daya saing nasional. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang stabil dan transparan demi mewujudkan kedaulatan ekonomi yang tangguh di kancah internasional.

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja, dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan DPMPTSP Kabupaten Kebumen yang diterapkan dalam terwujudnya visi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara profesional;
- b) Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif;
- c) Meningkatkan pengawasan pengendalian Penanaman Modal.

DPMPTSP Kabupaten Kebumen diarahkan pada upaya perbaikan secara terus menerus pada semua kegiatan, melalui keterlibatan semua aparatur untuk meningkatkan kepuasan/citra layanan kepada masyarakat pada umumnya, Karyawan/Karyawati pada khususnya. Kegiatan yang telah dilakukan pada periode tahun anggaran yaitu:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik pada Mal Pelayanan Publik;
- b) Melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis terkait;
- c) Mengembangkan *digital investment promotion*;
- d) Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
- e) Melakukan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
- f) Menyelenggarakan seminar bisnis, gathering ke pelaku usaha, dan sosialisasi/bimbingan teknis umkm;
- g) Melaksanakan forum bisnis kepada pelaku usaha, dan Memberikan apresiasi kepada pelaku usaha dalam bentuk anugerah usaha terbaik;
- h) Penyebarluasan peluang investasi secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- i) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis bagi petugas layanan guna meningkatkan softskill dan kemampuan teknisnya;
- j) Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
- k) Pelaksanaan sosialisasi kebijakan fasilitas/insentif kepada pelaku usaha bersama dengan instansi terkait guna meningkatkan antusias pelaku usaha untuk merealisasikan investasinya di Kabupaten Kebumen;
- l) Melaksanakan pelaksanaan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha secara berkala agar meningkatkan realisasi investasi melalui LKPM sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m) Melakukan update kegiatan baik informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan, dan terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, instagram, facebook, maupun media sosial lainnya;
- n) Peningkatan respons masyarakat terkait konsultasi dan pengaduan

- perizinan terintegrasi baik secara langsung maupun melalui media online;
- o) Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah guna menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - p) Melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik dimaksudkan agar masyarakat/pengguna layanan merasa nyaman dalam menyelesaikan proses perizinannya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- a) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
- b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan merumuskan indikator kinerja, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini yang juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk kedepannya sehingga tujuan dan sasaran dapat terlaksanakan dengan baik. Penetapan indikator kinerja ini juga dapat dijadikan untuk memantau dan mengendalikan kinerja dalam kurun waktu tertentu, selain itu juga bisa membantu dalam melaksanakan evaluasi kinerja sehingga dapat secara konsisten mempertahankan kinerjanya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Pencapaian kinerja tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang ditargetkan pada akhir periode Renstra.

Terdapat satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan yang ditangani DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026.

Setiap indikator kinerja utama (IKU) dalam dokumen ini telah dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu (SMART), serta memiliki definisi operasional yang jelas untuk memastikan konsistensi dalam pengukuran kinerja.

Tabel II.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kebumen

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan
1.	Tujuan: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi	%	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sub sektor Penanaman Modal terhadap perekonomian Kabupaten Kebumen karena investasi yang masuk bersifat investasi kontinyu dan belum optimal dalam menyerap tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB atas dasar harga konstan tahun (n)} - \text{PDRB atas dasar harga normal tahun (n-1)}}{\text{PDRB atas dasar harga konstan tahun (n-1)}} \times 100\%$
2.	Sasaran: Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	Miliar rupiah	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sub sektor Penanaman Modal terhadap perekonomian Kabupaten Kebumen karena investasi yang masuk bersifat investasi kontinyu dan belum optimal dalam menyerap tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB atas dasar harga konstan tahun (n)} - \text{PDRB atas dasar harga normal tahun (n-1)}}{\text{PDRB atas dasar harga konstan tahun (n-1)}} \times 100\%$
3.	IKU Urusan: Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	%	Indikator ini dipilih untuk mengukur keberhasilan pada upaya pengembangan investasi di Kabupaten Kebumen	$\frac{(\text{Jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun (n)} - \text{jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020})}{\text{jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020}} \times 100\%$ *)PMA dan PMDN

Sumber: Renstra DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Target indikator kinerja sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel II.3.
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Kebumen

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (%)		Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026) (%)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Tujuan									
1	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Miliar Rupiah	388,76	392,53	397,00	401,00	405,00	409,00	413,00	2.025,00
B	Indikator Sasaran (IKU OPD)									
	Indikator Urusan Penanaman Modal									
1	Meningkatnya investasi	%	-	1,00	2,15	3,18	4,21	5,24	6,27	6,27

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen komitmen yang memuat tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, sebagai dasar pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja kepada pemberi kewenangan. Pada Tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Kebumen melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tujuan:				
1.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	Miliar rupiah	409
Sasaran:				
2.	Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	Persen	5,24

Sumber: Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana terlihat pada Tabel II.5.

Tabel II.5.
Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.708.139.700
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	27.020.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	3 Laporan	3.320.685.000
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	168.130.000
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	122.069.000
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	421.537.000
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Unit	182.100.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMA/PMDN	409 Miliar Rupiah	56.688.300
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas.insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	32.316.500
b	Pembuatan Peta Potensi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi	2 Dokumen	24.371.800
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal	100 %	224.462.000
a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal	2 Kegiatan	224.462.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	100 %	99.930.500
a	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	100 Dokumen	99.930.500

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	100%	64.002.300
a	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	108 kali	64.002.300
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	21.515.600
a	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	2 Dokumen	21.515.600
Jumlah				4.708.139.700

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan beberapa hal.

1. membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja, dengan rumus:
$$\text{Capaian (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%.$$
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selanjutnya, untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan MenpanRB Nomor Tahun sebagaimana terlihat pada tabel III.1.

Tabel III. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 84,99%	Cukup
4	≥50 – 64,99%	Kurang
	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Sumber: Permenpan Nomor

Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Adapun capaian kinerja organisasi DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang dilihat dari capaian indikator kinerja utama sebagaimana terlihat dalam Tabel III.2.

Tabel III. 2
Capaian Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	5,00 – 5,50	5,89	107,09
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	Milyar Rupiah	409,00	754,86	184,56
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	Persen (%)	5,24	9,92	189,31

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Tabel III.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 5,50	5,89	107,09	Sangat Baik	BPS Kabumen
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	409,00	754,86	184,56	Sangat Baik	DPMPTS P
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	5,24	9,92	189,31	Sangat Baik	DPMPTS P

Sumber : DPMPTSP Kebumen, 2025. Data Diolah

Capaian tujuan strategis adalah 107,09%, capaian sasaran adalah 184,56%, dan capaian IKU urusan sebesar 9,92% atau dengan prosentase 189,31%.

Tabel III.4

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 5,50	5,62	102,18	5,00 – 5,50	5,38	97,81	5,00 – 5,50	5,89	107,09
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	401,00	628,23	156,67	405,00	686,76	169,57	409,00	754,86	184,56
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	3,97	11,26	724,65	4,21	9,32	221,38	5,24	9,92	189,31

Sumber : DPMPTSP Kebumen, 2025. Data Diolah

Untuk memperoleh gambaran perkembangan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan diperlukan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya. Melalui perbandingan ini dapat diketahui kecenderungan capaian kinerja, baik yang mengalami peningkatan, penurunan, maupun stagnasi, sehingga memberikan dasar untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, hasil perbandingan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,62	5,38	5,89	5,50	Mencapai Target
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	628,23	686,76	754,86	2.025	Mencapai Target
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	11,26	9,32	9,92	6.00	Mencapai Target

Sumber : DPMPTSP Kebumen, 2025. Data Diolah

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja diatas, kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan, khususnya pada indikator-indikator yang mengukur kinerja urusan penanaman modal. Hal tersebut sejalan dengan indikator tujuan, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

Pada indikator sasaran “Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHK”, target yang ditetapkan mengalami peningkatan nilai investasi bertahap dari tahun 2021 sebesar Rp392,00 miliar hingga tahun 2025 sebesar Rp409,00 miliar. Realisasi kinerja pada indikator ini secara konsisten melampaui target setiap tahunnya. Pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp488,52 miliar atau 124,62%, meningkat menjadi Rp564,64 miliar (142,23%) pada tahun 2022 dan Rp628,23 miliar (156,67%) pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 realisasi tercatat sebesar Rp686,76 miliar dengan capaian 169,57%, dan pada tahun 2025 meningkat signifikan menjadi Rp754,86 miliar dengan capaian kinerja 184,56%. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mendorong realisasi investasi yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah

Sementara itu, pada indikator urusan “Persentase Peningkatan Investasi”, target kinerja juga mengalami kenaikan secara bertahap, dari 1,00% pada tahun 2021 menjadi 5,24% pada tahun 2025. Realisasi persentase peningkatan investasi menunjukkan fluktuasi namun tetap berada di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 realisasi mencapai 25,70% dengan capaian 2.570,00%, kemudian pada tahun 2022 sebesar 15,58% (724,65%), tahun 2023 sebesar 11,26% (354,09%), dan tahun 2024 sebesar 9,32% (221,38%). Pada tahun 2025, realisasi persentase peningkatan investasi tercatat sebesar 9,92% dengan capaian kinerja 189,31%, yang menunjukkan kinerja tetap sangat baik meskipun tingkat pertumbuhan lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik III.1
Realisasi Investasi Tahun 2023-2025 Kabupaten Kebumen



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Secara keseluruhan, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target, baik pada indikator sasaran maupun indikator urusan. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan, program, dan inovasi pelayanan penanaman modal yang dilaksanakan, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen.

Dengan demikian, kinerja indikator persentase peningkatan investasi pada Tahun 2025 dinilai sangat berhasil, tercermin dari capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung karena berhasilnya penerapan kegiatan sosialisasi fasilitasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko, inspeksi lapangan yang langsung terinformasikan kepada pelaku usaha. Secara keseluruhan, kinerja urusan penanaman modal menunjukkan capaian yang sangat positif dan berkontribusi signifikan terhadap tujuan pembangunan daerah, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkualitas, dan merata.

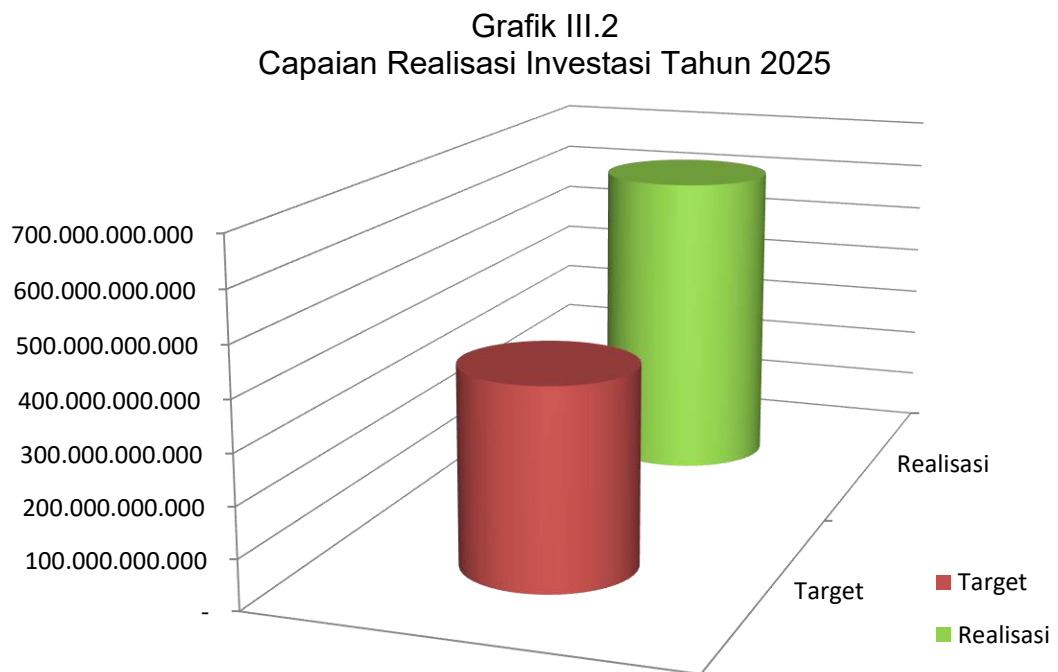
Tabel III.6
Capaian Kinerja dengan Kategorisasi Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 5,50	5,89	107,09	Sangat Baik	BPS Kabumen
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	409,00	754,86	184,56	Sangat Baik	DPMPTSP
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	5,24	9,92	189,31	Sangat Baik	DPMPTSP

Sumber : DPMPTSP Kebumen, 2025. Data Diolah

Target nilai investasi Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp409.000.000.000. Realisasi investasi mencapai Rp754.865.606.686 atau 184,56% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik serta mengalami peningkatan dibandingkan realisasi investasi Tahun 2024 sebesar Rp686.760.779.257. Target persentase peningkatan investasi Tahun 2025 sebesar 5,24%, dengan realisasi mencapai 9,92%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 189,31%. Persentase peningkatan investasi Tahun 2025 tersebut tidak hanya melampaui target, tetapi juga lebih tinggi dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang sebesar 9,32%.

Persentase peningkatan investasi dihitung berdasarkan selisih realisasi investasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi investasi Tahun 2024. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh persentase peningkatan investasi sebesar 9,92%, yang berada di atas target IKU urusan penanaman modal sebesar 5,24%.



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Adapun rincian realisasi investasi tahun 2025 berdasarkan triwulan adalah sebagai berikut:

- a. Triwulan I sebesar Rp150.857.553.727, dengan jumlah proyek sebanyak 3.728 proyek dan serapan tenaga kerja sebanyak 7.940 orang;

- b. Triwulan II sebesar Rp118.643.327.026, dengan jumlah proyek sebanyak 3.678 proyek dan serapan tenaga kerja sebanyak 8.459 orang;
- c. Triwulan III sebesar Rp353.093.414.892, dengan jumlah proyek sebanyak 10.935 proyek dan serapan tenaga kerja sebanyak 23.918 orang;
- d. Triwulan IV sebesar Rp132.271.311.041, dengan jumlah proyek sebanyak 4.209 proyek dan serapan tenaga kerja sebanyak 7.739 orang.

Peningkatan investasi tersebut merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Realisasi investasi dapat tercapai dikarenakan maksimalnya layanan kepada masyarakat dalam mensosialisasikan informasi terkait fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah dan intensnya pelaksanaan pengawasan penanaman modal sehingga laporan pelaksanaan kegiatan usaha dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel III.7

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 5,50	5,89	107,09	Berhasil melampaui target kinerja secara signifikan.	Optimalisasi sektor unggulan daerah, pemberian stimulus bagi UMKM, dan penguatan konsumsi rumah tangga melalui stabilitas harga pangan.
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	409,00	754,86	184,56	Berhasil mencapai target dengan pertumbuhan yang sangat progresif.	Memberikan kemudahan perizinan melalui sistem OSS-RBA, penyediaan infrastruktur pendukung investasi, serta pemberian insentif bagi penanam modal.
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	5,24	9,92	189,31	Berhasil melampaui target kinerja secara optimal.	Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana kerja, penguatan promosi investasi secara digital, dan fasilitasi penyelesaian kendala usaha (debottlenecking).

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Pencapaian target kinerja pada urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang melampaui angka 100% merupakan hasil dari integrasi kebijakan yang komprehensif. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa langkah taktis dan solusi berkelanjutan, antara lain:

- a) Akselerasi Digitalisasi Perizinan: Implementasi penuh sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) telah memangkas rantai birokrasi, sehingga memberikan kepastian waktu dan biaya bagi para pelaku usaha. Hal ini berkontribusi langsung pada lonjakan persentase peningkatan investasi yang mencapai 189,31%.
- b) Fasilitasi dan Debottlenecking: Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai penyedia izin, tetapi juga aktif melakukan pendampingan langsung terhadap proyek-proyek investasi yang mengalami kendala lapangan, baik terkait regulasi sektoral maupun permasalahan teknis di lokasi usaha.
- c) Penguatan Iklim Investasi Lokal: Tingginya nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) menunjukkan adanya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi daerah. Solusi yang dilakukan mencakup penyediaan database potensi investasi yang akurat serta penyelenggaraan forum bisnis untuk mempertemukan investor dengan sektor unggulan daerah.
- d) Sinergi Ekonomi Inklusif: Keberhasilan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89% didorong oleh kebijakan yang mewajibkan kemitraan antara investor besar dengan UMKM lokal. Langkah ini memastikan bahwa aliran modal yang masuk memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.

Di tengah dinamika ekonomi global dan regional, penguatan sektor investasi menjadi pilar utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui integrasi layanan perizinan yang lebih cepat, mudah, dan transparan, daerah berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi para investor. Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan performa indikator makro dan sektoral, yang menunjukkan sinergitas antara perencanaan strategis dengan implementasi program kerja yang telah dilaksanakan:

Tabel III.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 5,50	5,89	-	-	-	-
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan modal tetap bruto ADHK	409,00	754,86	-	-	-	-
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	5,24	9,92	Rp.4.279.353.110,-	Rp.3.415.745.323,-	79,82	20,18

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya performa yang sangat progresif pada sektor penanaman modal. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor keberhasilan dan solusi yang telah dilakukan:

1. Analisis Capaian Kinerja

- Pertumbuhan Ekonomi (107,09%): Realisasi sebesar 5,89% melampaui ambang batas atas target. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas daya beli dan optimalisasi sektor unggulan.
- Investasi dan PMTB (184,56% & 189,31%): Terjadi lonjakan investasi yang sangat signifikan. Pencapaian hampir dua kali lipat dari target ini membuktikan bahwa daerah memiliki daya tarik tinggi bagi pemilik modal dan didukung oleh infrastruktur yang semakin memadai.
- Tingkat Efisiensi Anggaran: Pada IKU Urusan, target kinerja tercapai 189,31% hanya dengan menggunakan 79,82% anggaran. Hal ini menghasilkan Tingkat Efisiensi sebesar 20,18% (penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas hasil), yang menunjukkan tata kelola keuangan yang sangat optimal.

2. Solusi Strategis yang Dilakukan

- Digitalisasi Layanan (OSS-RBA): Implementasi penuh sistem perizinan berbasis risiko yang transparan dan cepat, sehingga meminimalisir hambatan birokrasi bagi investor.
- Program Jemput Bola: Pelaksanaan layanan perizinan keliling untuk memfasilitasi legalitas usaha bagi pelaku ekonomi di wilayah kecamatan dan pelosok.
- Fasilitasi Kendala (Debottlenecking): Pendampingan aktif oleh satgas khusus untuk membantu investor menyelesaikan kendala operasional, baik teknis maupun administratif di lapangan.
- Sinergi Investasi-UMKM: Mewajibkan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM lokal guna memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 sebesar 90,18%, dengan kategori sangat baik. Adapun peran nyata dan upaya yang telah dilakukan DPMPTSP Kabupaten Kebumen dalam mencapai target kinerja tahun 2025 antara lain:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) secara optimal, transparan, dan akuntabel;
- b. Meningkatkan inovasi pelayanan melalui program JEMPOL SATU (Jemput Bola Satu Pintu) yaitu mendatangi pelaku usaha atau pemohon perizinan di berbagai wilayah, antara lain Kecamatan Klirong, Pejagoan, Karangsambung, Karanggayam, Karanganyar, Kebumen, Prembun, serta asosiasi UMKM;

- c. Mendorong ketersediaan lahan investasi di sektor industri, perdagangan, jasa, dan properti dengan luasan yang memadai pada lokasi strategis, didukung ketersediaan infrastruktur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik;
- d. Memberikan kemudahan layanan perizinan melalui sistem GALAKSI (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi) yang menyediakan informasi peluang investasi, UMKM, dan potensi daerah bagi calon investor;
- e. Melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPMPTSP Kabupaten Kebumen dengan instansi penyelenggara layanan di MPP, antara lain Bank Jateng, Samsat, KPP Pratama, Disdukcapil, BP3MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri, BPKPD, Disdik, Disnaker, Taspen, PLN, Disperkimhub, DPUPR, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap;
- f. Memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dengan instansi horizontal maupun vertikal sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP;
- g. Mengintensifkan pengawasan penanaman modal terhadap pelaku usaha secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Kebumen;
- h. Mempermudah proses perizinan melalui pemanfaatan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk penerbitan NIB serta Sistem Informasi Perizinan Kabupaten Kebumen (SIPERI);
- i. Melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media daring (website, media sosial, dan kanal informasi lainnya);
- j. Merespon meningkatnya minat pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan berusaha;
- k. Melakukan inovasi dan apresiasi kepada penanam modal/pelaku usaha melalui partisipasi dalam berbagai event daerah seperti pameran dan *International Business and Investment Forum* (IBIF), serta pemberian penghargaan Anugerah Usaha Terbaik (AUT) sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kebumen.

3.1.1. Analisa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah untuk menilai implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP mengalami penurunan nilai walaupun predikat masih sama yaitu dengan predikat BB.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKE AKIP) Tahun 2025 Nomor 700/IP.RB/24/2025 tanggal 15 Juli 2025, DPMPTSP Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **71,35** termasuk dalam kategori penilaian **“BB” (Sangat Baik)** walaupun nilai tersebut menurun dari tahun 2024 yang mencapai nilai 76,65 dengan

kategori “BB”. Adapun rincian hasil penilaian untuk setiap komponen sebagai berikut:

- 1. Perencanaan kinerja dengan bobot (30) nilai 22,20
- 2. Pengukuran kinerja dengan bobot (30) nilai 21,60
- 3. Pelaporan kinerja dengan bobot (15) nilai 10,05
- 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot (25) nilai 17,50

Sedangkan beberapa rekomendasi atas kelemahan atau kekurangan dalam kondisi tersebut yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen dan tindaklanjutnya sebagaimana terlihat pada tabel III.9.

Tabel III.9
Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2025

NO	REKOMENDASI	TNIDAK LANJUT	DATA DUKUNG TINDAK LANJUT
1.	Menyusun Pohon Kinerja dengan mempertimbangkan <i>logical framework</i> dan <i>Critical Succes Factor (CSF)</i> menggunakan aplikasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.	Telah dilakukan penyusunan Pohon Kinerja dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>Critical Success Factor (CSF)</i> melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.	Link aplikasi Pohon Kinerja / Dokumen Pohon Kinerja https://acesse.one/ZULwd
2.	Menyusun Pohon Kinerja dengan menggambarkan bagaimana pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.	Pohon Kinerja telah disusun dengan menggambarkan keterkaitan dan pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang serta sinergi dengan Perangkat Daerah lain sesuai tugas dan fungsinya.	Dokumen Pohon Kinerja Terintegrasi dengan <i>crosscutting</i> kinerja https://1nk.dev/gpPlu
3.	Meningkatkan kualitas rencana aksi atas perjanjian kinerja dengan merencanakan aktivitas yang lebih riil dalam mencapai sasaran/target kinerja.	Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja telah diperbaiki dengan merumuskan aktivitas yang lebih operasional, terukur, dan realistis dalam pencapaian sasaran kinerja.	Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja https://acesse.one/DWgHc
4.	Meningkatkan kualitas dan kepatuhan atas format penyusunan laporan kinerja (LKjIP) dengan mempedomani Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017.	Penyusunan LKjIP telah disesuaikan dengan format dan substansi sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017.	Dokumen LKjIP Revisi https://1nk.dev/g53GQ
5.	Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi atas capaian kinerja secara detail dengan menjabarkan proses perolehannya serta konteks/dampaknya terhadap masyarakat atau <i>best pertice/prestasi</i> atas capaian kinerja.	Laporan kinerja telah disempurnakan dengan penyajian capaian kinerja secara lebih rinci, termasuk proses perolehan dan dampaknya bagi masyarakat serta <i>best practice</i> yang dicapai.	Dokumen LKjIP Revisi https://1nk.dev/g53GQ
6.	Menyelaraskan indikator kinerja dan target yang ditetapkan baik di Renstra, Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja pada laporan kinerja (LKjIP).	Telah dilakukan penyeselarasan indikator kinerja dan target antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan realisasi kinerja dalam LKjIP.	Matriks Keterkaitan IKU https://1nk.dev/g53

NO	REKOMENDASI	TNIDAK LANJUT	DATA DUKUNG TINDAK LANJUT
			GQ
7.	Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP.	Telah disusun SOP pengumpulan dan pengelolaan data kinerja sebagai pedoman pelaksanaan pengukuran kinerja.	Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja https://l1nk.dev/zipGEX
8.	Meningkatkan kepatuhan dan kualitas Monev Kinerja dengan memastikan ketentuan dokumen yang diunggah pada aplikasi e-semarak maupun e-sakip.	Monitoring dan evaluasi kinerja telah ditingkatkan dengan memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah pada aplikasi e-Semarak dan e-SAKIP.	Screenshot unggahan dokumen di E-Semarak https://l1nk.dev/GinXx
9.	Meningkatkan kualitas laporan monev kinerja dengan: 1) Menambah kolom identifikasi faktor keberhasilan/ permasalahan dan Solusi pada form monev kinerja. 2) Menyelaraskan data target pada rencana aksi dengan laporan monev.	Form monev kinerja telah disempurnakan dengan penambahan kolom identifikasi faktor keberhasilan/permasalahan dan solusi, serta penyelarasan target rencana aksi dengan laporan monev.	Form Monev Kinerja hasil reviu https://acesse.one/psRyV
10.	Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja (LKjIP) dengan: 1) Mengunggah laporan LKjIP tepat waktu pada aplikasi e-sakip. 2) Merevisi informasi realisasi capaian IKU yang tadinya ada di BAB II LKjIP, ke BAB III. 3) Menambahkan sub bab Tindak Lanjut SAKIP Tahun sebelumnya pada daftar isi. 4) Menambahkan lampiran Daftar Prestasi pada laporan kinerja (LKjIP). 5) Mempublikasikan Laporan Kinerja LKjIP pada website resmi.	LKjIP telah diunggah tepat waktu, struktur bab telah diperbaiki, subbab tindak lanjut SAKIP ditambahkan, lampiran prestasi dilengkapi, serta LKjIP dipublikasikan pada website resmi DPMPTSP.	Link Website DPMPTSP / Bukti Unggah dokumen https://acesse.one/psRyV
11.	Menyempurnakan kualitas kinerja dengan menyajikan informasi atas capaian kinerja secara detail dengan menjabarkan proses perolehannya serta dampaknya pada masyarakat atau <i>best prestice</i> /prestasi atas capaian kinerja.	Penyajian capaian kinerja telah dilengkapi dengan uraian proses, konteks, dampak, serta prestasi yang mendukung pencapaian kinerja.	Dokumen LKjIP hasil reviu Inspektorat daerah https://acesse.one/psRyV
12.	Menyelaraskan indikator dan target yang ada di Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada LKjIP mengacu pada Perbup 82 tahun 2022 tentang IKU.	Indikator dan target pada Perjanjian Kinerja telah diselaraskan dengan LKjIP mengacu pada Perbup Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 tentang IKU.	Dokumen PK & LkjiP https://acesse.one/psRyV
13.	Merevisi rumusan capaian dengan membandingkan antara realisasi dengan target target x 100%.	Rumusan capaian kinerja telah direvisi menggunakan formula persentase capaian sesuai ketentuan.	Tabel Perhitungan Capaian kinerja https://acesse.one/

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG TINDAK LANJUT
			psRyV
14.	Merevisi rumusan capaian perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (n) dengan target jangka menengah.	Analisis capaian telah disesuaikan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan (n) terhadap target jangka menengah.	Tabel Analisis Capaian https://acesse.one/psRyV
15.	Menyelaraskan informasi indikator target kinerja pada Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi telah diselaraskan dengan indikator dan target kinerja yang ditetapkan.	Dokumen Analisis Kinerja https://acesse.one/psRyV
16.	Menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dengan rumusan: perbandingan antara realisasi kinerja disbanding dengan realisasi keuangan.	Analisis efisiensi kinerja telah disajikan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap realisasi keuangan.	Tabel Analisis Efisiensi https://acesse.one/psRyV
17.	Menyelaraskan antara Strategi Peningkatan Kinerja dengan permasalahan/kendala yang dihadapi.	Strategi peningkatan kinerja telah disesuaikan dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja.	Dokumen Strategi Peningkatan Kinerja https://acesse.one/psRyV
18.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.	Seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dan terus ditindaklanjuti secara bertahap sebagai upaya peningkatan kualitas SAKIP.	Rekap Tindak Lanjut LHE https://acesse.one/psRyV

Sumber : DPMPSTSP Kab.Kebumen, 2025

Rekomendasi tersebut telah diimplementasikan dalam kegiatan yang telah telaksana pada tahun 2025, diantaranya: penyusunan dokumen *crosscutting* secara koordinatif dengan setiap PPTK dan pemangku anggaran, melaksanakan monitoring atas rencana aksi secara bersamaan dengan pelaksanaan rakor pop/k, melakukan analisis atas perbaikan kinerja tahun sebelumnya pada dokumen rencana kerja, dan penyempurnaan kualitas laporan kinerja.

Selanjutnya, terkait dengan analisis keberhasilan dan kegagalan program dan Kegiatan dapat dijelaskan dalam tabel III.10.

Tabel III.10
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah						
2.	Sasaran : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Nilai Investasi PMA/PMDN (Milyar Rupiah)	184,56	Program pelayanan penanaman modal	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100%	Menunjang
				Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100%	
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	105,56%	Menunjang
				Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	108 Kali	
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi	100%	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 Dokumen	
3.	IKU Urusan : Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	184,56	Program pengembangan iklim penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	754,87 Miliar rupiah	Menunjang
				Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 Dokumen	
				Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Dokumen potensi investasi dan peluang usaha	2 Dokumen	
				Program promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	5 Dokumen	Menunjang
				Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	2 Dokumen	
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian SAKIP	115,02	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota daerah	Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Menunjang
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	10 Dokumen	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23 Orang/ bulan	
				Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	6 Unit	
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	36 Unit	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Program pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi pembuatan kajian potensi/peluang investasi maupun pemberian fasilitas insentif/kemudahan penanaman modal akan mendorong peningkatan jumlah investasi baru maupun memanfaatkan Central Java Investment Platform (CJIP) yang dikembangkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan upload profil potensi/peluang investasi tersebut di aplikasi CJIP yang dapat diakses oleh publik secara luas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Program promosi penanaman modal juga mendorong pencapaian indikator kinerja peningkatan jumlah investasi baru skala nasional karena dengan adanya kegiatan promosi akan menghasilkan Letter Of Intent (LOI) dari investor yang akan dilakukan proses lebih lanjut sehingga dapat terealisasi dan menambah jumlah investor baru yang berinvestasi di Kabupaten Kebumen. Untuk LOI pada tahun 2022-2024 berhasil mendapatkan 9 LOI (*Letter Of Intent*) dengan total sekitar Rp 1.021.909.495.495 yang terdiri dari: PT. JJG Spotec Indo, RS PKU Muhammadiyah Kutowinangun, PT. Cemerlang Unggas Lestari (PT.CUL), Naura Amusement Park, RS PKU Muhammadiyah Sruweng, UMNU Kebumen, PT. Sugeng Joyo Lautan Semesta dan PT. Tanah Laut, Tbk.

Untuk pertumbuhan nilai investasi baik PMA maupun PMDN didukung oleh program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi berbagai macam kegiatan antara lain pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan pelaporan LKPM, fasilitasi penyelesaian masalah penanam modal, pemantauan dan pengawasan penanaman modal dimana semua kegiatan tersebut dapat mendorong para pelaku usaha untuk dapat mencatatkan realisasi investasinya. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diukur dengan indikator Nilai Investasi PMA/PMDN didukung oleh program pelayanan penanaman modal yang meliputi kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen maupun penanganan pengaduan yang seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan proses perizinannya.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal juga mendukung indikator Nilai Investasi PMA/PMDN melalui penyediaan

fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dari sistem informasi maupun sarana pendukung jaringan internet, pemeliharaan sarana prasarana maupun helpdesk terkait penggunaan sistem maupun kendala dari sisi hardware maupun software. Pelaksanaan pelayanan perizinan dapat dilakukan pengolahan data perizinan, publikasi data dan informasi agar dapat dimanfaatkan masyarakat serta mendukung indikator nilai Investasi. Adapun kegiatan Program ini Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

3.1.2. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan untuk menilai tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam menghasilkan capaian kinerja. Efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap tingkat capaian kinerja pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja.

Tabel III.11
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

No		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.774.731.000	2.926.621.454	77,53
	A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	27.020.000	26.727.020	98,92
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	2.861.075.000	2.059.264.184	71,98
	A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	168.130.000	167.913.979	99,87
	B	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.069.000	120.835.560	98,99
	A	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.337.000	370.080.311	89,32
	b	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.100.000	181.800.400	99,84
2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	56.688.300	56.000.930	98,79

No		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
	a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	32.316.500	32.015.200	99,07
	b	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi Investasi	24.371.800	23.985.730	98,42
3		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	262.485.410	250.643.029	95,49
	a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	262.485.410	250.643.029	95,49
4		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	99.930.500	98.495.360	98,56
	a	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Layanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik	99.930.500	98.495.360	98,56
5		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	64.002.300	63.242.280	98,81
	a	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	64.002.300	63.242.280	98,81
6		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	21.515.600	20.742.270	96,41
	a	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	21.515.600	20.742.270	96,41
JUMLAH				4.279.353.110	3.415.745.323	79,82

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2025

Pagu anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp4.279.353.110, dapat terealisasi sebesar Rp3.415.745.323 atau 79,82% dengan realisasi fisik untuk masing-masing sub kegiatan 100%. Anggaran yang tidak dapat terealisasi adalah Rp863.607.787 atau sebesar 20,18% sebagian besar berupa penyediaan gaji dan tunjangan pegawai.

Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja yang memenuhi bahkan melampaui target, dengan realisasi anggaran yang lebih rendah atau proporsional terhadap pagu yang ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa output dan outcome dapat dicapai tanpa pemborosan sumber daya. Efisiensi kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Perencanaan anggaran berbasis kinerja yang semakin selaras antara target kinerja dan kebutuhan pendanaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang lebih terfokus dan terintegrasi, sehingga menghindari duplikasi program;
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan dan monitoring kegiatan;
- d. Penguatan pengendalian internal, yang mendorong ketepatan sasaran dan ketertiban administrasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi belum optimal, yang disebabkan oleh penyesuaian kebijakan, perubahan prioritas pembangunan, serta dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja.

Efektifitas penggunaan sumber daya aparatur pegawai dapat dilihat dari jumlah kebutuhan pegawai dan kondisi yang ada saat ini, sebagaimana terlihat dalam tabel III.12.

Tabel III.12
Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Keadaan Saat Ini

No	Jabatan	Bezzeting Awal	Bezzeting Saat Ini	Kebutuhan Pegawai	Selisih (Kurang/Lebih)
1	Kepala Dinas	1	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	1	1	1	0
3	Kasubag Umum	1	1	1	0
4	JF Perencana Ahli Muda	1	0	1	-1
5	JF Perencana Ahli Pertama	0	1	1	0
6	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	1	0
7	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	1	0
8	Pengolah Data dan Informasi	0	0	1	-1
9	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	0	1	-1
10	JF Arsiparis Ahli Pertama	0	0	1	-1
11	JF Arsiparis Penyelia	0	0	1	-1
12	JF Arsiparis Mahir	0	0	1	-1
13	JF Arsiparis Terampil	1	1	3	-2
14	JF Penata Laksana Barang Terampil	0	0	1	-1
15	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	2	-1
16	Pengolah Data dan Informasi	2	2	5	-3
17	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	4	-2
18	Operator Layanan Operasional	0	0	8	-8
19	JF Penata Perizinan Ahli Madya	1	1	5	-4
20	JF Penata Perizinan Ahli Muda	2	2	8	-6
21	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	2	3	10	-7
22	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	0	0	2	-2
23	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	1	4	-3
24	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	3	3	6	-3

No	Jabatan	Bezzeting Awal	Bezzeting Saat Ini	Kebutuhan Pegawai	Selisih (Kurang/Lebih)
25	JF Pranata Komputer Ahli Muda	0	0	0	0
26	JF Pranata Komputer Pertama	1	1	1	0
27	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	4	-3
28	Pengolah Data dan Informasi	0	0	9	-9
29	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	3	-2
Jumlah		22	23	71	-48

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Realisasi SDM pegawai DPMPTSP Kabupaten Kebumen sebanyak 23 pegawai dari kebutuhan 71 pegawai (32,39%). Dapat disimpulkan penggunaan SDM efisien. Namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah pegawai sesuai dengan kebutuhan.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kebumen telah dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp4.279.353.110 (setelah perubahan) dengan rincian dan realisasi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel III.13.

Tabel III.13
Realisasi anggaran DPMPTSP Kab. Kebumen Tahun 2025

No	Rincian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Operasi	4.157.284.110	3.294.909.763	862.374.347	79,26
	Belanja Pegawai	2.826.952.000	2.028.319.759	798.632.241	71,75
	Belanja Barang dan Jasa	1.330.332.110	1.266.590.004	63.742.106	95,21
2.	Belanja Modal	122.069.000	120.835.560	1.233.440	98,99
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.069.000	120.835.560	1.233.440	98,99
Jumlah		4.279.353.110	3.415.745.323	863.607.787	79,82

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

Dari data tersebut realisasi belanja sebesar Rp3.415.745.323 atau 79,82% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp4.279.353.110. Pagu anggaran belanja operasi sebesar Rp4.157.284.110 yang terealisasi sebesar Rp3.294.909.763 atau 79,26%, dan belanja modal sebesar Rp122.069.000 terealisasi sebesar Rp120.835.560 atau 98,99%. Realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada tabel III.14.

Dari tabel III.14 dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp4.279.353.110 untuk membiayai enam program dan 11 kegiatan serta 31 sub kegiatan. Realisasi anggaran untuk tahun 2025 adalah 79,82% dengan jumlah realisasi sebesar Rp3.415.745.323 dan sisa anggaran Rp863.607.787 atau 20,18%. Realisasi fisik semua subkegiatan masing-masing sebesar 100% dan realisasi keuangan kurang dari 90% yang terserap pada masing-masing sub kegiatan.

Adapun satu sub kegiatan yang serapannya masih di bawah 75% yaitu: subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan yang terealisasi 71,75% karena beberapa hal.

- a. penyediaan gaji untuk CPNS mulai bulan April 2025 dan baru direalisasikan di Bulan Juni 2025 (2 CPNS),
- b. ada dua PNS yang purna tugas,
- c. tunjangan jabatan fungsional (Penata Kelola Penanaman Modal serta Penata Perizinan) untuk delapan PNS belum bisa dibayar karena belum terbit Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan fungsional tersebut.

Tabel III.14
Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2025

Uraian Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan				Indikator Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Target S/D Desember		Realisasi S/D Desember		Realisasi Fisik	Deviasi	
											Keu SPJ	Fisik
					(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
A			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.774.731.000	3.774.731.000	100,00	2.926.621.454	77,53	100,00	22,47	0,00
	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	27.020.000	27.020.000	100,00	26.727.020	98,9	100,00	1,08	0,00
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20.490.000	20.490.000	100,00	20.340.620	99,27	100,00	1,16	0,00
		b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6.530.000	6.530.000	100,00	6.386.400	97,80	100,00	2,20	0,00
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	2.861.075.000	2.861.075.000	100,00	2.059.264.184	72,0	100,00	28,02	0,00
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2.826.952.000	2.826.952.000	100,00	2.028.319.759	71,75	100,00	28,76	0,00
		b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	34.123.000	34.123.000	100,00	30.944.425	90,68	100,00	9,32	0,00
	3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	168.130.000	168.130.000	100,00	167.913.979	99,9	100,00	0,13	0,00
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30.000.000	30.000.000	100,00	29.990.610	99,97	100,00	0,03	0,00
		b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30.000.000	30.000.000	100,00	29.976.037	99,92	100,00	0,08	0,00

Uraian Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan				Indikator Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Target S/D Desember		Realisasi S/D Desember		Realisasi Fisik	Deviasi	
											Keu SPJ	Fisik
						(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
		c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	27.130.000	27.130.000	100,00	27.103.300	99,90	100,00	0,09	0,00
		d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	100,00	0,00	0,00
		e	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	28.500.000	28.500.000	100,00	28.365.295	99,53	100,00	0,47	0,00
		f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	49.500.000	49.500.000	100,00	49.499.637	100,00	100,00	0,66	0,00
		g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00	1.479.100	98,61	100,00	1,39	0,00
	4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.069.000	122.069.000	100,00	120.835.560	99,0	100,00	1,01	0,00
		a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	122.069.000	122.069.000	100,00	120.835.560	98,99	100,00	1,01	0,00
	5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.337.000	414.337.000	100,00	370.080.311	89,3	100,00	10,68	0,00
		a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00
		b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	275.000.000	275.000.000	100,00	236.767.034	86,10	100,00	13,91	0,00
		c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	137.337.000	137.337.000	100,00	131.313.277	95,61	100,00	4,39	0,00

Uraian Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan				Indikator Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Target S/D Desember		Realisasi S/D Desember		Realisasi Fisik	Deviasi	
											Keu SPJ	Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
	6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.100.000	182.100.000	100,00	181.800.400	99,8	100,00	0,16	0,00
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	120.000.000	120.000.000	100,00	119.955.400	99,96	100,00	6,20	0,00
		b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00
		c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	39.100.000	39.100.000	100,00	38.947.000	99,61	100,00	99,61	0,00
		d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20.000.000	20.000.000	100,00	19.898.000	99,49	100,00	0,51	0,00
B			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	56.688.300	56.688.300	200,00	56.000.930	197	200,00	2,52	0,00
	1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	32.316.500	32.316.500	100,00	32.015.200	99,1	100,00	0,93	0,00
		a	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	28.501.500	28.501.500	100,00	28.453.100	99,83	100,00	0,17	0,00
		b	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3.815.000	3.815.000	100,00	3.562.100	93,37	100,00	6,63	0,00
	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi Investasi	24.371.800	24.371.800	100,00	23.985.730	98,4	100,00	1,58	0,00
		a	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum	7.155.000	7.155.000	100,00	7.018.280	98,09	100,00	15,27	0,00

Uraian Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan				Indikator Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Target S/D Desember		Realisasi S/D Desember		Realisasi Fisik	Deviasi	
											Keu SPJ	Fisik
					(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
				Penanaman Modal yang disusun								
		b	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	17.216.800	17.216.800	100,00	16.967.450	98,55	100,00	1,45	0,00
C			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	262.485.410	262.485.410	100,00	250.643.029	95,49	100,00	4,51	95,49
	1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	262.485.410	262.485.410	100,00	250.643.029	95,5	100,0	4,51	95,49
		a	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	247.506.410	247.506.410	100,00	235.924.529	95,32	100,00	4,68	0,00
		b	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	14.979.000	14.979.000	100,00	14.718.500	98,26	100,00	1,74	0,00
D			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	99.930.500	99.930.500	100,00	98.495.360	98,56	100,00	1,44	0,00
	1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Layanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik	99.930.500	99.930.500	100,00	98.495.360	98,6	100,0	1,44	0,00
		a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	10.204.000	10.204.000	100,00	10.148.140	99,45	100,00	0,55	0,00

Uraian Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan				Indikator Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Target S/D Desember		Realisasi S/D Desember		Realisasi Fisik	Deviasi	
											Keu SPJ	Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
		b	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	66.126.500	66.126.500	100,00	64.804.020	98,00	100,00	2,33	0,00
		c	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	23.600.000	23.600.000	100,00	23.543.200	99,76	100,00	0,77	0,00
E			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	64.002.300	64.002.300	100,00	63.242.280	98,81	100,00	1,19	0,00
	1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	64.002.300	64.002.300	100,00	63.242.280	98,8	100,00	1,19	0,00
		a	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	17.400.000	17.400.000	100,00	17.098.380	98,27	100,00	9,97	0,00
		b	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku, dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	46.602.300	46.602.300	100,00	46.143.900	99,02	100,00	0,98	0,00

Uraian Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan				Indikator Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Target S/D Desember		Realisasi S/D Desember		Realisasi Fisik	Deviasi	
											Keu SPJ	Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
F			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	21.515.600	21.515.600	100,00	20.742.270	96,41	100,00	3,59	0,00
	1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	21.515.600	21.515.600	100,00	20.742.270	96,4	100,00	3,59	0,00
		a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	21.515.600	21.515.600	100,00	20.742.270	96,41	100,00	5,26	0,00
TOTAL BELANJA					4.279.353.110	4.279.353.110	100,00	3.415.745.323	79,82	100,00	20,18	0,00
BELANJA PEGAWAI					2.826.952.000	2.826.952.000	100,00	2.028.319.759	71,75	100,00	28,25	0,00
BELANJA BARANG DAN JASA					1.330.332.110	1.330.332.110	100,00	1.266.590.004	95,21	100,00	4,79	0,00
BELANJA MODAL					122.069.000	122.069.000	100,00	120.835.560	98,99	100,00	1,01	0,00

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2025.

1) Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Dari uraian pada bab sebelumnya, secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) DPMPTSP Kabupaten Kebumen mengampu misi ketiga dengan tujuan Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Dengan sasaran adalah meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah. Strategi yang telah dilakukan seperti:
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara professional
 - b) Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif
 - c) Meningkatkan pengawasan pengendalian penanaman modal
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Nilai investasi PMDN/PMA, pada tahun 2025 target yang ditetapkan adalah Rp.409.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.754.865.606.686 (184,56%). Sedangkan untuk capaian persentase peningkatan investasi, target yang ditetapkan adalah 5,24% dengan realisasi 9,92%. Sedangkan capaian target kinerja tahun 2025 terhadap Rencana Strategis sebesar 189,31%.
- 3) Pagu anggaran (setelah perubahan) tahun 2025 sebesar Rp.4.279.353.110, dapat terealisasi sebesar Rp.3.415.745.323 atau 79,82% dengan realisasi fisik untuk masing-masing subkegiatan 100%. Anggaran yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp.863.607.787 atau sebesar 20,18% sebagian besar berupa penyediaan gaji dan tunjangan pegawai.
- 4) Peran nyata yang telah dilaksanakan antara lain:
 - a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik secara optimal, transparan, dan akuntabel;
 - b. Meningkatkan inovasi pelayanan melalui program JEMPOL SATU (Jemput Bola Satu Pintu) dengan mendatangi langsung pelaku usaha atau pemohon perizinan di berbagai wilayah, antara lain Kecamatan Klirong, Pejagoan, Karangsambung, Karanggayam, Karanganyar, Petanahan, Kebumen, Prembun, serta asosiasi UMKM;

- c. Mendorong ketersediaan lahan investasi di sektor industri, perdagangan, jasa, dan properti dengan luasan yang memadai pada lokasi strategis, didukung ketersediaan infrastruktur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik;
- d. Memberikan kemudahan layanan perizinan melalui sistem GALAKSI (Gerai Layanan Kebumen Pro Investasi) yang menyediakan informasi peluang investasi, UMKM, dan potensi daerah bagi calon investor;
- e. Melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPMPTSP Kabupaten Kebumen dengan instansi penyelenggara layanan di MPP, antara lain Bank Jateng, Samsat, KPP Pratama, Disdukcapil, BP3MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri, BPKPD, Disdik, Disnaker, Taspen, PLN, Disperkimhub, DPUPR, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap;
- f. Memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dengan instansi horizontal maupun vertikal sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP;
- g. Mengintensifkan pengawasan penanaman modal terhadap pelaku usaha secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Kebumen;
- h. Mempermudah proses perizinan melalui pemanfaatan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk penerbitan NIB serta Sistem Informasi Perizinan Kabupaten Kebumen (SIPERI);
- i. Melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media daring (website, media sosial, dan kanal informasi lainnya);
- j. Merespon meningkatnya minat pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan berusaha;
- k. Melakukan inovasi dan apresiasi kepada penanam modal/pelaku usaha melalui partisipasi dalam berbagai event daerah seperti pameran dan *International Business and Investment Forum* (IBIF), serta pemberian penghargaan Anugerah Usaha Terbaik (AUT) sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kebumen.

4.2. Permasalahan/Kendala.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- a) Anggaran untuk pendukung Investasi sampai saat ini alokasi anggaran untuk masing- masing kegiatan belum sesuai dengan yang direncanakan;

- b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya melaporkan kegiatan usahanya dalam sistem LKPM;
- c) Investasi yang masuk sebagian besar hanya pengembangan usaha bukan pembukaan usaha baru;
- d) Masih kurangnya perlengkapan penunjang layanan publik dalam mencukupi permintaan masyarakat atas layanan yang cepat, tepat, dan mudah dalam prosesnya;
- e) Belum tersusunnya Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- f) Belum optimalnya penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan secara komprehensif;
- g) Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dibutuhkan;
- h) Data profil peluang investasi tidak *up to date* secara berkala;
- i. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan guna kegiatan usahanya;

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja.

Dalam rangka peningkatan dan pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang, beberapa perencanaan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

- a) Untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota diupayakan dengan meningkatkan alokasi anggaran.
- b) Memastikan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach berjalan lancar. Targetnya adalah menghapus stigma "birokrasi yang berbelit" menjadi "karpas merah bagi investor."
- c) Penyediaan Investment Project Ready to Offer (IPRO): Pemerintah daerah tidak boleh hanya menawarkan lahan kosong. IPRO berarti menawarkan paket investasi yang sudah lengkap dengan studi kelayakan (feasibility study), analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kepastian tata ruang.
- d) Penguatan Infrastruktur Konektivitas: Mempercepat akses jalan menuju kawasan industri atau objek wisata. Investor sangat sensitif terhadap biaya logistik; semakin lancar aksesnya, semakin rendah biayanya.

- e) Pemberian Insentif Daerah: Selain insentif fiskal pusat, daerah bisa memberikan keringanan pajak/retribusi daerah atau kemudahan akses lahan bagi investor yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

Adapun beberapa upaya yang mungkin perlu dilakukan guna mampu meningkatkan potensi investasi dan daya tarik penanam modal di daerah. Beberapa langkah langkah yang mungkin perlu dilakukan antara lain:

- 1) Memastikan kesiapan data dan informasi dalam menyambut calon investor. Melakukan pembenahan internal dan data potensi yang ada di daerah, dilanjutkan peningkatan kapasitas layanan dengan membentuk tim khusus untuk mendampingi calon investor/penanam modal.
- 2) Strategi Promosi Digital (*Digital Marketing Strategy*). Dilakukan dengan satu aplikasi yang merangkum beberapa fitur yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, dan diintenskan untuk mempromosikan melalui media sosial, serta untuk meningkatkan prioritas kata kunci produk daerah pada *search engine*.

4.4. Komitmen Perbaikan

Ke depan, DPMPTSP Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas indikator, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.

Kebumen, 05 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen



Sukanto, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 196912241990011001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran 1. | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 |
| Lampiran 2. | Anggaran dan Realisasi Belanja DPMPTSP Kabupaten Kebumen |
| Lampiran 3. | Prestasi yang telah dicapai DPMPTSP Kabupaten Kebumen |
| Lampiran 4. | Dokumen pendukung lainnya |